



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

NOMOR SOP	KEC.LMJ/Subag Umpeg/427.90/02/2023
TGL. PEMBUATAN	2 Oktober 2023
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	2 Oktober 2023
DISAHKAN OLEH	 CAMAT LUMAJANG Kabupaten Lumajang NIP. 097012181991011002
NAMA SOP	Penanganan Benturan Kepentingan

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Petunjuk-Pelaksanaan-Sistem-Penanganan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (6. Pengaduan Whistleblower System.	<ol style="list-style-type: none">a. Camat Lumajangb. Sekretaris Kecamatan.c. Para Kepala Seksi Kecamatan Lumajangd. Para Kepala Sub Bagian Kecamatan Lumajange. Para Staf Kecamatan Lumajang
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
<ul style="list-style-type: none">- Foto Copy Cascading- SK Tim Sakip- IKU Tahun 2023- IKI Tahun 2023- Renstra- Renja/RKT Tahun 2023- PK Tahun 2023- PK Individu- Rencana Aksi Tahun 2023- DPA Tahun 2023- Rencana Aksi Individu- LkJIP Tahun 2023- Renja Tahun 2024- Rencana Aksi Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none">a. Komputer/Laptop;b. ATK.c. Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Analisa Dan Kompetensi Jabatan tidak diselesaikan maka kegiatan akan terhambat	Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy

No.	Aktivitas	PELAKU					Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai	Atasan Langsung	Sekcam	Tim Penanganan BK	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung	Mulai					Surat Pernyataan	480 Menit	Surat Pernyataan	melampirkan bukti bukti terkait
2	Menerima surat pernyataan potensi benturan kepentingan dari pegawai dan memeriksa tentang kebenaran laporan pegawai selanjutnya menyampaikan potensi benturan kepentingan kepada Kepala Unit Kerja						Surat Pernyataan	120 Menit	Surat Pernyataan	laporan pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja
3	Menerima potensi benturan kepentingan dan memonitoring langkah penyelesaian yang diambil oleh atasan langsung serta melaporkan kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan						Surat Pernyataan	120 Menit	Surat Pernyataan	
4	Menerima dan merekapitulasi potensi benturan kepentingan dan memonitoring hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan yang telah dilakukan pegawai maupun pimpinan unit kerja serta melaporkan hasilnya kepada Dirjen PSDKP setiap semester						Surat Pernyataan	2 hari	Laporan rekapitulasi dan laporan hasil monitoring	
5	Menerima laporan hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan tiap semester						Laporan rekapitulasi dan laporan hasil monitoring	5 Menit	Laporan potensi benturan kepentingan	